

Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bima Rizki Saputra

Administrasi Bisnis, Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni

Universitas Sahid Surakarta

Email : rizkibima40@gmail.com

Abstract.

Community empowerment aims to improve community empowerment for the better, especially in the social, economic, and political fields. Meanwhile, social entrepreneurship is a concept that prioritizes collaboration, innovation, and creation in its implementation to produce economic activity. Based on this, there is great hope that social entrepreneurship can be a solution for community empowerment to solve social problems that exist in society, namely poverty. Thus, social entrepreneurship plays a role in community empowerment which aims to improve community welfare. The purpose of writing this literature study is to find out and prove that social entrepreneurship plays a role in community empowerment. This writing was compiled using the literature study method and continued by concluding the concepts that were the focus of the discussion, conducting a search on previous research related to community empowerment and the role of social entrepreneurship. In this article, the results show that social .Entrepreneurship activities have their own role in community empowerment. That way, entrepreneurship can be considered to play an important role in community empowerment which aims to improve people's welfare.

Keywords: Social Entrepreneurship; Community Empowerment ; Poverty

Cronicle of Article:Received (19,08,2024); Revised (23,08,2024); and Published (28,08,2024).

©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Profile and corresponding author Bima Rizki Saputra adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Sosial ,Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta. Jl. Adi Sucipto No.154, Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57144. Corresponding Author:rizkibima49@gmail.com

How to cite this article : Saputra,B,R (2024) "Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Adbispreneur*, 4 (4), pp. 392-404. Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

Masalah yang ada di Indonesia terbilang cukup banyak yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dimana masalah- masalah ini dapat memicu masalah lain, yaitu kekerasan maupun pencurian. Kemiskinan didefinisikan oleh Suyanto (2013) sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya

penghasilan atau tidak dimilikinya pekerjaan yang cukup. Kemiskinan juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan kelemahan jasmani (Chambers, 1983). Pada 10 Juli 2024 a, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa terdapat 9,03% atau 25,22 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin pada bulan Maret 2024. Kemudian Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumelung (2016) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Boeng Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana dari pengelola program pemberdayaan. Hal serupa ditemukan kembali pada Penelitian yang dilakukan oleh Dharmantaka (2015) yang berlokasi di Kota Batu yang mana terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan kredit usaha yang diberikan. Data ini membuktikan bahwa upaya dalam memecahkan permasalahan kemiskinan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun begitu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bukti-bukti yang mendukung bahwa pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya dapat mandiri menjadi mengalami ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan. Masalah sosial kerap terjadi secara struktural. Namun, masalah-masalah tersebut, terutama kemiskinan, dapat dihadapi oleh masyarakat itu sendiri dengan usaha-usaha untuk mengubah kondisi dan struktur sosial masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan untuk menjadi solusi dari masalah-masalah sosial. Menurut Suyanto (2001) kegagalan dalam membantu masyarakat untuk mandiri dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi melainkan berkaitan dengan banyak persoalan seperti aspek sosial, budaya, geografi, dan lainnya yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam terwujudnya masyarakat yang mandiri.

Dengan kata lain, kemiskinan keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai tujuannya. Kemiskinan bisa mengganggu psikis seseorang sehingga berdampak negatif terhadap seseorang. Kemiskinan yang tidak diatasi dengan segera akan memberikan dampak terhadap masyarakat, diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan oleh pendidikan serta keterampilan yang rendah, hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang berakibat pada sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidupnya dan tidak memungkinkan untuk memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kemiskinan bisa berdampak pada kriminalitas dan praktik kejahatan yang disebabkan oleh masalah kemiskinan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup berakibat sebagian masyarakat mengambil jalan cepat yang tidak memikirkan keselamatan orang lain, dirinya, dan keluarga.

Kondisi lain yang tidak kunjung selesai ialah anak putus sekolah yang mana lebih mementingkan mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada sekedar menjalani pendidikan. Dari hal tersebut berakibat semakin terpuruknya individu dalam kemiskinan. Selanjutnya, faktor yang didukung dengan kurangnya pemahaman agama yang menjadikan tindakan ini dilakukan dengan alasan klise yang mendesak akan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan tingginya angka kriminal dan rendahnya pendidikan berakibat pada terancamnya generasi penerus bangsa yang tidak berpendidikan, hanya bekerja sebagai buruh, dan memiliki gangguan mental maupun fisik. Disisi lain, Syawie (2011) menyatakan bahwa banyak masyarakat yang gagal dalam menghadapi masalah kemiskinan dan kelaparan. Hilangnya harapan, kepercayaan diri yang

menurun, jiwa kompetitif yang rendah menjadi kondisi yang fatal karena mereka tidak menyadari arti hidup itu sendiri yang berakibat mengambil jalan yang tidak seharusnya dengan harapan bisa terbebas dari permasalahan yang dihadapi. Tidak sedikit masyarakat yang tidak tahan menghadapi berbagai cobaan hidup, kekurangan gizi bahkan kelaparan. Hal ini akan merujuk pada proses kematian lebih cepat sebelum waktunya. Inilah proses kematian secara pelan-pelan tetapi kejam (Syawie 2011).

Gunawan Sumodiningrat berpendapat bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga definisi yang berbeda. Pertama, kemiskinan yang bersifat absolut yang merupakan kondisi dimana pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi minimal kebutuhan hidup diantaranya kebutuhan kesehatan, pangan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan mempermudah proses dalam bekerja. Bersumber pada data yang diperoleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2007 menyatakan faktanya akumulasi penduduk miskin dengan angka mencapai 37,17 juta jiwa yang totalnya 16,58% dari total penduduk di Indonesia. Dari hal tersebut menyatakan kemiskinan sangat sering terjadi di Indonesia yang bisa disebabkan oleh (1) Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, angka kelahiran suatu negara akan selalu bertambah yang akhirnya mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk di suatu negara menjadi sangat melonjak dari pertumbuhan tersebut menyebabkan kekurangannya suatu negara terhadap lapangan kerja.

Hal itu menjadi membatasi masyarakat yang memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuannya. Dari hal tersebut angka kemiskinan akan semakin naik seiring berjalannya waktu. (2) Masyarakat yang menganggur meningkat, baik dari desa hingga perkotaan masyarakat menganggur akan menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. (3) Pendidikan yang rendah, hal ini cenderung menjadi faktor yang sangat penting karena jika tidak menempuh pendidikan akan menyebabkan kurangnya kreatifitas, keterampilan serta wawasan yang luas untuk menempuh pekerjaan yang berat. Dari hal tersebut masyarakat yang berpendidikan rendah akan sulit bersaing dengan masyarakat yang menempuh pendidikan. (4) Pendapatan yang tidak merata, hal ini menyebabkan ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya, dengan kata lain yang minim memiliki sumber daya akan berada dibawah garis kemiskinan. (5) Terjadi bencana, bencana alam merupakan hal yang tidak bisa dihindari namun dapat menimbulkan kerusakan yang banyak dan kerugian terhadap masyarakat yang terdampak. Kemiskinan itu sendiri memiliki jenis yang dibagi menjadi empat jenis yaitu (1) Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang menjadikan suatu kondisi di mana pendapatan seorang individu atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan. Hal itu akan berpengaruh terhadap seseorang susah untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (2) Kemiskinan Relatif, yaitu bentuk kemiskinan yang dipengaruhi dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan. (3) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.

Terdapat berbagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dikembangkan dengan banyak program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya yang melibatkan masyarakat dengan atau tanpa pihak eksternal, untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan basis kekuatan yang mereka miliki melalui optimalisasi potensi; dalam pemberdayaan diwajibkan untuk menentukan potensi yang dimiliki untuk menjadi sumber utama dalam membangun

kemandirian masyarakat (Mustanir, 2020). Menurut Widjaja(2003), pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat, terdapat potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kondisi ekonomi dari masyarakat. Pemberdayaan atau pengembangan masyarakat merupakan salah satu dari tujuh subjek inti tanggung jawab sosial yang dinyatakan oleh ISO 2600 pada tahun 2010.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan pemberdayaan masyarakat juga akan menumbuhkan kemandirian pada masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat dibagi menjadi 3 aspek yaitu pertama, Enabling dimana menciptakan suasana agar masyarakat dapat berkembang. Kedua, Empowering merupakan cara untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah- langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang dibuat masyarakat untuk berdaya. Ketiga, Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Salah satu solusi atau bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah peningkatan semangat kewirausahaan dalam setiap individu yang ada di masyarakat, melalui pengembangan kewirausahaan sosial (Palesangi, 2012).

Konsep kewirausahaan sosial digagas oleh Bill Drayton, pendiri Ashoka Foundation. Drayton menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam kewirausahaan sosial, yaitu (1) adanya inovasi sosial yang memiliki potensi untuk mengubah sistem yang terdapat dalam masyarakat dan (2) adanya individu yang memiliki visi yang kuat, kreatif, memiliki semangat berwirausaha, dan beretika. Dalam berjalannya proses pemberdayaan masyarakat, dapat ditemukan kedua aspek tersebut yang dimulai dengan munculnya individu-individu yang berpotensi.

Menurut Hulgard (2010), kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan suatu nilai sosial yang dihasilkan dari kolaborasi antara orang dan organisasi dari masyarakat sipil yang terikat dalam inovasi sosial yang biasanya menceritakan aktivitas ekonomi. Munculnya kewirausahaan sosial ditandai dengan munculnya berbagai seminar yang membahas topik kewirausahaan sosial dan terbentuknya AKSI atau Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia pada tahun 2009. Kewirausahaan sosial memiliki beberapa tujuan, seperti untuk menyelesaikan masalah sosial, mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Harvey Leibenstein (1968, 1979) berpendapat bahwa kegiatan kewirausahaan meliputi aktifitas-aktifitas dalam rangka melakukan perusahaan saat dimana semua pasar masih belum jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui secara menyeluruh. Terdapat tiga macam kategori kewirausahaan sosial, yaitu (1) social bricoleurs, mereka yang mengalami langsung masalah sosial di komunitasnya dan memiliki tujuan untuk memecahkan isu sosial yang ada di komunitas; (2) social constructionist, mereka yang dapat mengenali potensi yang ada; dan (3) social engineers, mereka yang berfokus pada isu berskala luas (Malunga, Iwu, & Mugobo, 2014). Kewirausahaan sosial merupakan cara yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membangun kemandiriannya untuk pembangunan dan pembenahan hidup ekonomi sosial untuk kedepannya. Wirausahawan sosial dapat

menciptakan jalan keluar untuk permasalahan sosial dengan mengutamakan nilai keberlanjutan (Crisan dan Borza, 2012).

Kewirausahaan sosial mengedepankan pada inovasi, kreatifitas, kolaborasi, pengembangan jaringan, serta melihat peluang baru. Kewirausahaan sosial juga biasanya tidak selalu berfokus pada profit atau keuntungan finansial tetapi dengan tujuan yang mulia untuk misi sosial. Masalah sosial sangat beragam seperti kemiskinan. Kewirausahaan sosial merupakan solusi penyelesaian masalah sosial yang ada. Jean Baptise Say dan Joseph Schumpeter menyatakan bahwa karakteristik utama yang tampak dari wirausahawan adalah inovasi dan pembaharuan terhadap proses produksi barang atau jasa. Menurut (Crisan dan Borza, 2012) pemecahan masalah sosial di masyarakat. Pada banyak kasus, wirausahawan sosial menciptakan jalan keluar berkelanjutan bagi permasalahan sosial.

LITERATUR REVIUW

Kepuasan Mitra Usaha

1. Social Entrepreneur

Social entrepreneurship banyak dikembangkan di sejumlah bidang yang berbeda, mulai dari non-profit, profit, sektor publik, dan kombinasi dari ketiganya. Menurut Bill Drayton (pendiri Ashoka Foundation) selaku penggagas social entrepreneurship terdapat dua hal kunci dalam social entrepreneurship. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu yang mempunyai visi, kreatif, berjiwa wirausaha (entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Hulgard (2010) merangkum definisi social entrepreneurship secara lebih komprehensif yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi

Social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari entrepreneurship. Gabungan dari dua kata, social yang artinya kemasyarakatan, dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari social entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare) (Cukier, 2011).

Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Schumpeter dalam Sledzik (2013) yang mengungkap entrepreneur adalah orang yang berani mendobrak sistem yang ada dengan menggagas sistem baru. Jelas bahwa social entrepreneur pun memiliki kemampuan untuk berani melawan tantangan atau dalam definisi lain adalah seseorang yang berani loncat dari zona kemapanan yang ada. Berbeda dengan kewirausahaan bisnis, output yang ingin diraih oleh social entrepreneurship tidaklah profit belaka, tetapi juga bertujuan memberikan efek positif bagi masyarakat.

Social entrepreneur adalah agen perubahan (change agent) yang mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah, dan meningkatkan nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan diberbagai bidang (Santosa, 2007). Seorang social entrepreneur selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus menerus bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan

atau keterbatasan yang dihadapinya dan memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang diperolehnya, kepada masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan pemberdayaan masyarakat juga akan menumbuhkan kemandirian pada masyarakat. Upaya untuk memberdayakan masyarakat dibagi menjadi 3 aspek yaitu pertama, Enabling dimana menciptakan suasana agar masyarakat dapat berkembang. Kedua, Empowering merupakan cara untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah- langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang dibuat masyarakat untuk berdaya. Ketiga, Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Salah satu solusi atau bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah peningkatan semangat kewirausahaan dalam setiap individu yang ada di masyarakat, melalui pengembangan kewirausahaan sosial (Palesangi, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan studi literature yang bertujuan menerima pelukisan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akibat pemasaran perguruan tinggi. Langkah yg dilalui adalah pengumpulan isu berasal literature artikel jurnal online dengan membuat meta analisis jurnal menjadi asal primer. Selanjutnya dilengkapi dengan referensi kitab, tulisan online yang berkaitan menggunakan penekanan penelitian. Jadi kegiatan riset hanya bersifat studi kepustakaan, belum dilakukan pencarian data kekinian pada suatu lokasi secara kuantitatif melalui studi lapangan oleh peneliti. Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature (Library Research). Asal yang dijadikan rujukan artinya buku- kitab, google scholar, artikel ilmiah online, dan blog ilmiah. (Musthofa et al. 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kewirausahaan Sosial terhadap Kemiskinan Pada tahun 1984, pendekatan berbasis kewirausahaan sosial mulai dikenalkan oleh Bill Drayton yang telah berhasil mendapatkan MacArthur Award atas kerja kerasnya dalam membangun Ashoka Foundation. Ashoka Foundation berdiri bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Seiring berjalannya waktu, Ashoka Foundation semakin melebarkan usahanya untuk fokus pada misi sosial yang dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Ashoka Foundation hingga sekarang semakin berkembang dan memiliki cabang diberbagai negara. Keahlian Bill Drayton dalam mengembangkan usahanya dan memilih untuk mengerucutkan usahanya pada kegiatan yang mengarah pada peningkatan aspek sosial di masyarakat. Hal ini membuat banyak lapisan masyarakat melihat sebuah jalan untuk berwirausaha pada aspek sosial yang dapat dikembangkan dengan pendekatan berbasis kewirausahaan. Kemudian, keberadaan Grameen Bank yaitu organisasi keuangan mikro yang berkembang menjadi sebuah usaha bisnis yang dapat menghasilkan laba dan telah berkontribusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di Indonesia juga semakin banyak perusahaan yang menerapkan konsep kewirausahaan sosial diantaranya seperti, Putera Sampoerna Foundation (PSF) yaitu lembaga yang bertujuan untuk membentuk putra dan putri bangsa melalui

pendidikan dan pemberdayaan. Putera Sampoerna Foundation (PSF) memiliki unit kewirausahaan yang disebut Acces Education Beyond yang mana hasil keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentunya dilakukan dengan bantuan- bantuan ketersediaan dari investor atau donatur yang akan membantu melakukan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Skoll (2009) yang mengatakan bahwa kewirausahaan sosial membawa banyak perubahan sosial bagi masyarakat, terutama memperbaiki kualitas pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu, membawa perdamaian, dan bahkan mengeluarkan masyarakat dari lubang kemiskinan. Perkembangan kewirausahaan sosial yang semakin berkembang secara pesat untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, seperti yang dikatakan oleh Bornstein (2004, dalam Nicholls, 2008:14) pemecahan masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberdayaan yang dapat dimulai dengan dukungan dalam skala kecil hingga skala komunitas. Kemudian, pendidikan juga berpengaruh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan yaitu melalui penciptaan lapangan kerja yang mana kewirausahaan sosial dapat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Seelos dkk (2010) dengan judul *The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation Across Local Communities*, membahas mengenai relasi antara kewirausahaan sosial dengan lingkungan dalam konteks tempat dimana masyarakat melakukan praktik atau kegiatan kewirausahaan sosial. Kemudian, dibahas dan diidentifikasi juga mengenai studi kasus di beberapa lingkungan masyarakat. Hasil yang diperoleh adalah adanya relasi antara masyarakat yang menjadikannya salah satu tantangan untuk bisa membuat akses dan membangun sumber daya masyarakat lokal yang meliputi menjalin ikatan satu sama lain anggota masyarakat. Hal ini dikatakan, ikatan dengan masyarakat setempat ikut andil dan berperan dalam membangun hubungan yang kuat dan konsisten bagi external stakeholders. Kewirausahaan sosial memiliki aspek sosial yang terlihat dari aktivitas yang akan dilakukan yang mana bertujuan dan menargetkan sasaran yang tepat sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kewirausahaan sosial memfokuskan usaha yang bisa memberdayakan masyarakat yang kurang secara finansial, dengan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung dengan membekali finansial maupun keterampilan yang diharapkan dapat digunakan untuk bergotong royong menggerakkan usahanya agar memperoleh keuntungan, dan kemudian hasil usaha atau keuntungannya dihasilkan untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan begitu, kewirausahaan sosial tidak hanya mampu membuka banyak lapangan kerja, tetapi juga menciptakan pengaruh yang luas yang timbul dari kegiatan ekonomi yang mana akan membuat perekonomian lebih baik, dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Kemudian, terdapat organisasi Bina Swadaya yaitu organisasi yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada petani sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan finansial dan pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Bina Swadaya melakukan kewirausahaan berbentuk social business untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Laba yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan dikembangkan dan diberikan kembali kepada masyarakat yang akan menerima bantuan, terutama masyarakat yang lemah dalam aspek finansial (Haryadi dan Waluyo, 2006). Kesuksesan organisasi dalam mengimplementasikan kewirausahaan sosial sangat bergantung dengan konsep mengenai pendekatan kewirausahaan sosial bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini sejalan dengan kegiatan kewirausahaan sosial yang menerapkan nilai sosial dalam pelaksanaannya

sehingga kegiatan ini menitikberatkan cara memaksimalkan dampak sosial yang signifikan (Bornstein dan Davis, 2010). Selanjutnya, diperoleh hasil literatur mengenai organisasi Mitra Bali yang bergerak dalam bidang pemberdayaan untuk pengrajin di Bali. kegiatan ini berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Bali. Organisasi Mitra Bali memiliki cita-cita untuk membantu memberikan pemahaman mengenai model perdagangan yang adil (fair trade) sehingga pengrajin Bali dapat memperoleh hasil yang adil dari kerja keras yang telah dilakukan. Dalam melakukan pemberdayaan, organisasi ini mengajak pengrajin untuk melakukan identifikasi mengenai kekurangan mereka dalam berdagang dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut.

Kegiatan kewirausahaan sosial dianggap memiliki peran dalam mengatasi masalah sosial, terutama masalah kemiskinan. Gagasan dan inovasi yang terus berkembang menjadikan kegiatan kewirausahaan sosial membawa perubahan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial. Bersumber pada Schumpeter, kewirausahaan diartikan dengan "creative destruction" (Drucker, 1985). Hal ini dimaksudkan bahwa kewirausahaan sosial timbul karena adanya kreativitas yang menjadi sumber terbesar yang nantinya akan menghasilkan sebuah inovasi. Dari hasil literatur yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa kegiatan kewirausahaan sosial berperan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Kewirausahaan memiliki andil yang besar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pemberdayaan Masyarakat dengan Kewirausahaan Sosial dengan banyaknya masalah sosial yang ada di Indonesia, masyarakat diharuskan untuk menyadari peran penting yang mereka miliki demi pengentasan masalah-masalah tersebut. Berbagai program telah disediakan oleh pemerintah, namun hasil yang ada kerap kurang memuaskan karena masyarakat yang masih kurang peduli dengan keadaan sekitar. Oleh karena itu, fokus dari solusi yang dihadirkan harus seputar pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang terletak dalam diri individu-individu sebagai bagian dari masyarakat. Dengan pemberdayaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melakukan pembangunan (Utami, Gamaputra, Purba, & Prastyawan, 2017). Dengan diberikannya kebebasan dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat didorong untuk menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan dana dan aspek lain.

Terdapat tiga inti dari konsep pemberdayaan, yaitu (1) pengembangan (enabling), (2) pemberdayaan (empowering), dan (3) terciptanya kemandirian. Diambil dari tiga inti tersebut, pemberdayaan masyarakat memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan memberdayakan potensi-potensi tersebut guna menumbuhkan kemandirian dalam diri masyarakat. Penting untuk diingat bahwa masyarakat memiliki potensi dan kekuatan untuk mencari dan mengelola solusi bagi permasalahan yang dimiliki, oleh karena itu pihak eksternal bertanggung jawab untuk mendorong dan membantu masyarakat dalam mengelola potensi tersebut. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan (Utami, Gamaputra, Purba, & Prastyawan, 2017).

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dijauhkan dari aspek ketergantungan dalam bentuk donasi, bantuan yang didapatkan diharapkan dapat menghantarkan pada proses kemandirian (Sulistiyani, 2017). Kemandirian merupakan salah satu tujuan utama dari proses pemberdayaan. Hasil yang diharapkan dari pemberdayaan adalah masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan membangun lingkungan

untuk terus berkembang. Pemberdayaan adalah pembekalan wawasan bagi masyarakat agar masyarakat memiliki kecakapan dan keterampilan yang mumpuni. Berdasarkan Markidanto (2003), pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik guna memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat dengan proses belajar bersama yang mengedepankan aspek partisipatif. Kegiatan yang dilakukan harus bersifat partisipatif agar perubahan yang diinginkan dapat terjadi dalam diri semua pihak yang berkepentingan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga cara yang harus dilakukan (Mustanir, Barisan, & Hamid, 2017). Tiga cara tersebut adalah:

1. Menciptakan suasana yang dapat membuat potensi yang dimiliki masyarakat berkembang. Proses pemberdayaan masyarakat bergantung besar pada potensi dan kemandirian dalam diri masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki sudah digali dan dikembangkan semaksimal mungkin.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan wadah untuk opini dan saran, langkah-langkah yang realistis dan dapat dijangkau, dan target sasaran yang baik. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai aspek, baik berupa pemberian akses atau fasilitas. Dengan diberikannya sarana, akses, maupun fasilitas maka masyarakat akan lebih mudah untuk berkembang dan terbuka terhadap perubahan.
3. Memberdayakan masyarakat dengan tujuan melindungi dan membela kebutuhan maupun kepentingan masyarakat yang lemah.

Dari ketiga cara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, kepentingan dan kemandirian masyarakat merupakan aspek yang paling utama untuk diperhatikan. Potensi yang dimiliki masyarakat tidak dapat diacuhkan dan harus dikembangkan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mungkin ada di sekitar masyarakat. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi masyarakat adalah melalui kegiatan kewirausahaan sosial. Robin & Coulter berpendapat bahwa kewirausahaan merupakan langkah-langkah dimana seorang individu maupun kelompok memanfaatkan usaha yang teratur dan peluang yang ada untuk menciptakan nilai yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan dengan cara inovasi dan sifat unik, dan tidak mempertimbangkan sumber daya yang digunakan saat ini.

Namun, kewirausahaan sosial juga memiliki tantangan tersendiri, tantangan tersebut adalah untuk membuat masyarakat menerima ide yang ditawarkan (Dewanto, dkk, 2013). Masyarakat sebagai pelaku utama dari kewirausahaan sosial harus terbuka dan menerima ide yang diberikan untuk benar-benar merealisasikan kegiatan kewirausahaan sosial tersebut. Akan sulit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewirausahaan sosial apabila masyarakat tidak bersemangat dalam menjalaninya. Kekurangan semangat dan niat dari masyarakat juga dapat memberhentikan keberlanjutan dari kewirausahaan sosial yang dilakukan. Oleh karena itu, pihak eksternal sebagai enabler harus dapat menarik perhatian dan membangkitkan semangat dari masyarakat untuk berwirausaha sosial.

Dalam kewirausahaan sosial, terdapat beberapa aspek utama yang ditarik dari definisi kewirausahaan sosial berdasarkan Hulgard (2010), yang mengemukakan bahwa kewirausahaan sosial adalah "the creation of a social value that is produced in collaboration with people and organization from the civil society who are

engaged in social innovations that usually imply an economic activity". Empat aspek utama tersebut adalah:

1. Social Value

Nilai sosial merupakan aspek utama dalam kewirausahaan sosial karena kegiatan kewirausahaan sosial memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Civil Society

Masyarakat sipil adalah aktor utama yang partisipasinya bersifat penting guna memaksimalkan potensi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan sosial.

3. Innovation

Dalam kegiatan kewirausahaan sosial harus memiliki inovasi yang dapat membantu masyarakat.

4. Economic Activity

Kewirausahaan sosial merupakan kegiatan kolaborasi antara aktivitas ekonomi dan sosial, kedua hal tersebut harus seimbang dan tidak bisa berat sebelah.

Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kewirausahaan sosial memiliki nilai yang berbeda dengan kewirausahaan secara umum. Kewirausahaan sosial mengutamakan misi sosial yang ingin dicapai dan melakukan kegiatannya tidak semata untuk keuntungan finansial saja. Wirausahawan sosial melakukan kegiatan bisnis untuk mendukung tujuan sosial yang dimiliki. Terdapat tiga macam kategori kewirausahaan sosial berdasarkan Smith and Steven (dalam Malunga, Iwu, & Mugobo, 2014), yaitu (1) social bricoleurs yang merupakan kelompok yang mengalami masalah sosial secara langsung di sekitarnya, (2) social constructionist yang merupakan kelompok yang menyadari potensi yang ada namun belum disadari, dan (3) social engineers, yaitu kelompok yang berfokus pada isu dengan skala luas dan berusaha untuk mengubah keseluruhan sistem sosial untuk menyelesaikan isu tersebut. Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kewirausahaan sosial dapat dimasukkan ke dalam kategori social bricoleurs karena mereka merupakan pihak yang merasakan secara langsung masalah-masalah sosial yang ada. Hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk mencari solusi dari masalah tersebut karena mereka telah mengalami masalah tersebut sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan dalam tentang isu-isu yang ada. Sebagai social bricoleurs, masyarakat juga dapat memiliki semangat yang lebih besar untuk melakukan kegiatan kewirausahaan sosial agar mereka dapat terbebas dari masalah sosial yang ada. Masyarakat dapat lebih menjadi aktif dan kooperatif dalam prosesnya berwirausaha.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan aktivitas kewirausahaan sosial karena kewirausahaan sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan menjadi mandiri secara finansial. Dalam kewirausahaan sosial, masyarakat didorong untuk menjadi lebih kreatif untuk berinovasi dalam berbisnis. Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial sembari mengembangkan potensi dari dalam diri masyarakat yang belum tergali. Pemberdayaan

masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dengan kegiatan kewirausahaan sosial karena dalam kegiatan kewirausahaan sosial, masyarakat diberikan wadah untuk merealisasikan ide- ide yang dimiliki dan mengasah kemampuan yang terpendam di dalam masing-masing individu. Tidak hanya potensi yang dapat dimaksimalkan, kewirausahaan sosial juga memberikan jalan bagi masyarakat untuk dapat berdiri sendiri secara mandiri ke depannya, sehingga terdapat unsur keberlanjutan dalam aktivitasnya.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan kewirausahaan sosial adalah seperti membangun berbagai bentuk UMKM yang kreatif berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (bentuk kerajinan maupun produksi makanan) dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk memperjuangkan hasil panen atau memproduksi barang lain dari hasil panen tersebut. Masyarakat juga dapat didorong untuk memanfaatkan peternakan yang mungkin ada di wilayah. Pada intinya, bentuk usaha kewirausahaan sosial dapat disesuaikan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menaikkan taraf hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang memang sudah ada di sekitar.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya adalah dengan cara menggunakan pendekatan yang berisikan pemberdayaan. Pemberdayaan berfokus pada aspek-aspek penyadaran dan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu bentuk realisasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupannya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam masyarakat, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Kewirausahaan menjadi suatu cara bagaimana masyarakat bisa berkembang melalui inovasi yang akan dibawa. Masyarakat meningkatkan dan memperoleh barang jasa juga menjangkau sumber sumber produktif yang ada. Pemberdayaan masyarakat dengan Kewirausahaan sosial juga melakukan partisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan keputusan yang memengaruhi mereka.

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan tulisan diatas yaitu masyarakat harus lebih banyak mencari tahu agar bisa berkembang melalui pemberdayaan yang ada di lingkungannya. Kewirausahaan sangat membantu untuk mencapai tujuan berupa usaha, inovasi, dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan sebuah usaha yang ada. Melakukan pemberdayaan juga termasuk empowering atau penguat yang bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang kurang mampu dan tertinggal

dalam mengorganisir diri. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ini adalah masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Inisiatif dalam masyarakat seperti mencari akses untuk pemberdayaan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Penulis juga menyarankan usaha yang dijalankan berbentuk lebih menarik seperti mengembangkan lewat sosial media karena kewirausahaan merupakan proses mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain atau inovatif namun memberikan nilai yang lebih. Kewirausahaan juga membantu negara untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Pemberdayaan merupakan jalan untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan. Inisiatif pada masyarakat untuk pemberdayaan dalam mencapai seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan berguna untuk mendorong kemampuan masyarakat agar tidak mengalami ketergantungan pada bantuan yang ada di pemerintah dan pihak lain dalam menentukan perencanaan hidup kedepannya. Hal yang berkelanjutan akan menjadi komitmen masyarakat dan menimbulkan semangat kebersamaan tersebut yang dapat disalurkan melalui berbagai program pengembangan masyarakat atau community development. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa banyaknya wirausaha yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. London: Longman.

Leibenstein, H. (1979). *The general X-efficiency paradigm and the role of the entrepreneur*.

Entrepreneurship and Economic Development.

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. New York: Harper and Brothers. Suyanto, B. (2013). *Sosiologi pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Widjaja, N. (2003). *Pemberdayaan masyarakat dan aplikasi kebijakan sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Jurnal

Crisan, C., & Borza, A. (2012). *Social entrepreneurship and social responsibility*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 1026-1031.

Dharmantaka, I. W. (2015). *Pemberdayaan masyarakat di Kota Batu*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 45-54.

Hulgard, L. (2010). *Discourses of social entrepreneurship – Variations of the same theme?*. EMES European Research Network.

Leibenstein, H. (1968). *Entrepreneurship and development*. *American Economic Review*, 58(2), 72- 83.

- Malunga, P., Iwu, C. G., & Mugobo, V. V. (2014). Social bricoleurs, social constructionists, and social engineers: Exploring the relationship between social entrepreneurship and social change. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(8), 1-9.
- Mustanir, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 33-45.
- Palesangi, M. (2012). Pengembangan kewirausahaan sosial dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 11(1), 76-85.
- Santosa, P. H. (2007). Social entrepreneurship: A modern approach to social value creation. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 19(2), 145-160.
- Sledzik, K. (2013). Schumpeter's view on innovation and entrepreneurship. *Management Trends in Theory and Practice*, 89-95.
- Sumelung, F. (2016). Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Boeng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 213-229.
- Syawie, M. (2011). Problematika kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 56-67.